

TINJAUAN KESIAPAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Oleh
Febrilya

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo,
Kendari, Sulawesi Tenggara

ABSTRACT

This study aimed to analyze the readiness of Financial Management Board and the Regional Asset (BPKAD) Southeast Sulawesi province in implementing the Government Accounting Standards (SAP) Accrual Based seen from several indicators such Readiness Human Resources and Information Systems. The research is a qualitative research. Data analysis method used is qualitative descriptive analysis method. Data collection techniques in this study were interviews, observation, and documentation.

The results showed that the Financial Management Board and the Regional Asset (BPKAD) Southeast Sulawesi province in implementing the Accrual Based Government Accounting Standards were quite prepared seen from the indicators Readiness Human Resources and Information Systems. This is supported by the technical assistance that has been carried out every year to the employee BPKAD Southeast Sulawesi province in operating SIMDA applications that are now accrual-based.

Keywords: *Accrual-Based SAP Application Readiness, Human Resources and Information Systems*

I. PENDAHULUAN

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada BPKAD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk di konsolidasi atas pelaksanaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya. PPKD selaku entitas pelaporan menyusun laporan keuangan daerah dengan cara mengkonsolidasi laporan dari entitas akuntansi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk

pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan.

Laporan keuangan yang disusun untuk Tahun Anggaran 2014 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun dari sisi pelaksanaan belum sepenuhnya berjalan sesuai amanah dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengingat beberapa rambu-rambu belum dapat terpenuhi karena keterbatasan pemahaman di bidang akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimanakah kesiapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?. Tujuan penelitian untuk mengetahui Kesiapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Manfaat penelitian bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan maupun sumbangan pemikiran dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dalam mengelola laporan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. dan Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dalam melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dilihat dari proses kesiapan pemerintahan. Penelitian ini akan meneliti Kesiapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dilihat dari beberapa indikator diantaranya kesiapan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi.

II. KAJIAN TEORI

a. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2005). Menurut Fakhurrazi dalam Azwan (2015:13) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*.

b. Akuntansi Berbasis Kas dan Berbasis Akrual

1. Akuntansi Berbasis Kas

Menurut Halim dan Syam (2011:54) Basis kas merupakan pencatatan transaksi ekonomi hanya apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.

2. Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut Bastian (2009:123) Akuntansi akrual mengakui dan mencatat transaksi dan kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan.

c. Kelebihan dan Kekurangan Basis Akrual

Basis akrual akan mengakui transaksi ekonomi tidak didasarkan diterima atau dikeluarkannya uang tetapi ketika terjadi perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditandai dengan adanya aliran masuk atau keluar manfaat ekonomi. Basis akrual akan memberikan informasi yang lebih akurat dan mencatat transaksi sesuai waktunya sehingga konsep periodesasi dapat terpenuhi.

Menurut Bastian (2006:120), beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain: pertama, penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. Kedua, relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. Ketiga, dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal. Keempat, peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

d. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut harus mampu mengelola laporan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual.

e. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. SDM yang berkualitas harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Azwan (2015:19), dari segi kesiapan SDM terdapat beberapa indikator yang harus dipertimbangkan baik dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internal adalah Integritas, Kompetensi, dan Loyalitas. Adapun faktor-faktor yang dipengaruhi dari segi eksternal adalah *Reward*, Motivasi, dan Budaya Organisasi.

f. Kesiapan Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Azwan (2015:21), dari sisi kesiapan sistem informasi terdapat beberapa faktor yang menjadi indikator yaitu Sistem

Informasi Manajemen, Perangkat Lunak, serta Pelatihan dan pendampingan Sistem.

g. Persiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua

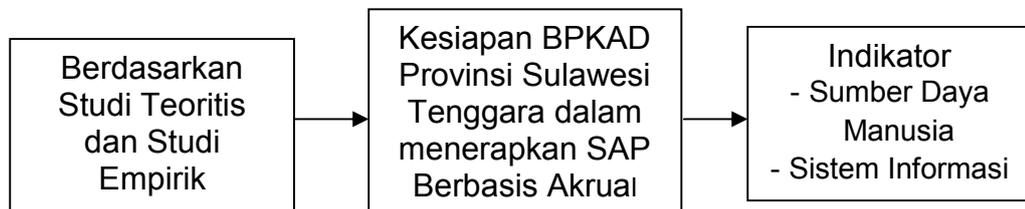
Menurut KSAP (2010), persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. *Hearing*-standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dilaksanakan pada desember 2009;
2. Sosialisasi dan penyesuaian peraturan yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2011 dalam hal ini penyusunan regulasi pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi/sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
3. Penyiapan dan pengembangan SDM akuntansi yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2015.

h. Kerangka Pikir

Berdasarkan Studi Teoritis dan Studi Empirik dapat dilihat bagaimana Kesiapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrua dengan Indikator yaitu Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada skema 1.

Skema 1 Kerangka Pikir Penelitian



III. METODE PENELITIAN

Objek dari penelitian ini adalah Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi dalam menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Populasi penelitian ini sebanyak 12 orang. Dengan sampel sebanyak 4 orang. Metode yang digunakan adalah *Purposive sampling* yang mana pengambilan sampel berdasarkan pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan peneliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka tetapi berbentuk konsep dan teori yang mendukung penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yakni data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, baik berupa informasi tentang kesiapan SDM maupun Sistem Informasi pemerintahan dalam menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Interview*, Observasi, dan Dokumentasi. *Interview* adalah kegiatan tanya jawab secara langsung dan mendalam (*Indepth interview*) kepada

pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informan kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Observasi digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kesiapan SDM dan Sistem Informasi dalam menerapkan SAP Berbasis Akrua. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa Struktur Organisasi dan sejarah singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
2. Basis kas merupakan pengakuan pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan.
3. Basis akrual merupakan sistem pencatatan akuntansi dimana pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas.
4. Sumber Daya Manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah.
5. Sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Indikator Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Kesiapan SDM dilihat dari segi Internal

a. Integritas

Pada BPKAD dilihat dari tingkat kejujuran sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena jika ada salah satu yang tidak jujur, maka akan mempengaruhi sistem dan juga mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dikatakan oleh KAA selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD, beliau mengatakan:

“Menurut saya, kejujuran sangat diperlukan di semua SKPD bukan hanya Pada BPKAD. Bila ada salah satu yang tidak jujur, maka akan mempengaruhi semua sistem. Jadi tujuannya mutlak harus memiliki kejujuran di BPKAD”. (L/KAA/09/06/2015)

Hal yang sama juga dikatakan oleh KAB selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas. Beliau mengatakan:

“Kejujuran itu sangat penting dalam mencapai tujuan kerja, terlebih lagi hal ini menyangkut pelaporan keuangan, apabila salah satu ada yang tidak jujur dalam pelaporannya maka akan menimbulkan kesalahan pada hasil akhir pelaporan tersebut”.(L/KAB/08/06/2015)

Pada tingkat ketegasan dan kebijaksanaan di BPKAD sudah sangat baik. Hal ini dikatakan juga oleh KAD selaku Kepala Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Beliau mengatakan:

“Beliau sangat tegas dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam hal bijaksana, beliau sangat bijak dalam memutuskan sesuatu”. (L/KAD/08/06/2015)

b. Kompetensi

Kompetensi yang dimiliki SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual di BPKAD terkait dengan pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual masih kurang. Saat ini kendala yang dihadapi yaitu latar belakang pendidikan akuntansi pegawai masih jarang, sehingga menyebabkan pemahaman tentang SAP Berbasis Akrual kurang maksimal. Namun dalam menghadapi kendala tersebut, BPKAD dibantu oleh aplikasi SIMDA yang bisa memudahkan dalam pelaporan laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada KAD selaku Kasubid Pertanggungjawaban APBD. Beliau mengatakan :

“....dalam proses penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual, belum begitu memahami akuntansi akrual, masih membutuhkan pendampingan...”. (L/KAD/08/06/2015)

c. Loyalitas

Di BPKAD tingkat loyalitas yang dimiliki sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada KAC selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas. Beliau mengatakan:

“.....dalam penyusunan laporan keuangan, kami sangat mendukung komitmen pimpinan, apa yang diinginkan pemimpin, kami selalu mengikuti arahnya”. (W/KAC/10/06/2015).

2. Kesiapan SDM dilihat dari segi Eksternal

a. Reward

BPKAD selalu memberikan apresiasi kepada pegawai yang cepat dalam memberikan informasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada KAD selaku Kepala Sub bidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Beliau mengatakan:

”para pegawai yang cepat memberikan informasi, akan diberikan apresiasi.....”. (L/KAD/08/06/2015)

b. Motivasi

Dalam mengoptimalkan hasil kinerja di bidang keuangan dengan menggunakan SAP di BPKAD dalam hal motivasi sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada KAA selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD, beliau mengatakan bahwa dorongan untuk mengoptimalkan hasil kinerja dibidang keuangan dengan menggunakan SAP pasti ada. Berikut kutipan wawancaranya:

“Dorongan untuk mengoptimalkan hasil kinerja dibidang keuangan dengan menggunakan SAP pasti ada, karena setiap ada informasi terbaru, kita kan dibantu dengan aplikasi SIMDA. Pimpinan mengarahkan kami untuk selalu mengupdate informasi terbaru tentang SAP....., dan beliau selalu memberikan motivasi kepada kami untuk belajar lebih baik lagi”. (L/KAA/09/06/2015)

c. Budaya Organisasi

Dilihat dari lingkungan kerja dalam menyelesaikan segala aktivitas dalam mendukung hasil kerja yang optimal di bidang keuangan dengan menggunakan SAP pada BPKAD, di bagian akuntansi sudah sangat baik, karena sudah tertata rapi dan dapat memberikan rasa nyaman bagi pegawai dalam bekerja. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh KAA selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD. Beliau mengatakan:

“iya, pertama dari tempat kerja terlebih dahulu, seperti di ruangan ini, kita sudah menata ruangan ini, hanya bidang akuntansi yang seperti ini nanti berikutnya baru susul bidang lainnya. Jika lingkungan kerja seperti ini kita merasa nyaman dalam bekerja. Kedua sebagai pimpinan harus jadi contoh ke bawahan....., Ketiga komunikasi, kalau saya di ruangan jarang, saya lebih banyak disini bersama teman-teman diskusi, menggali informasi apakah ada kendala, masing-masing kan ada sub bidangnya, apa kendalanya. Ini merupakan salah satu pendekatan keteman-teman. Dan juga kami setiap bulan mengadakan *coffe morning*.. sambil ngopi kami ngobrol apa kendala yang dialami dan mencari solusi dalam menghadapi kendala itu.....”. (L/KAA/09/06/2015)

b. Indikator Kesiapan Sistem Informasi dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Sistem Informasi Manajemen

BPKAD mempunyai program pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek dengan transparansi, akuntabilitas dalam bidang keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada KAA selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD. Beliau mengatakan:

“Selalu ada program kerja dari sistem perencanaan pemerintahan baik pusat maupun daerah yaitu, rencana jangka panjang 20 tahunan, rencana jangka menengah 5 tahun, rencana jangka pendek tahunan. Dari visi misi pak Gubernur, telah di tuangkan ke program-program dan kegiatan-kegiatan, yang nanti dimasukkan dalam Rencana Kerja, Rencana Kinerja tiap SKPD. Dan keuangan salah satunya. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu komitmen pak gubernur dalam penatausahaan keuangan. Sekarang terbukti kita mendapatkan WTP kemarin.”(L/KAA/09/06/2015)

2. Perangkat Lunak

Dari perangkat lunak yang telah tersedia di BPKAD, yaitu aplikasi SIMDA saat ini sudah aktual. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada KAC selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas. Beliau mengatakan:

“ iya, kalau disini aplikasi yang kami gunakan itu aplikasi SIMDA, untuk bagian keuangan SIMDA Keuangan dan untuk bagian aset SIMDA BMD yang saat ini sudah aktual dan sekarang kami gunakan yang otomatis”. (W/KAC/10/06/2015)

3. Pelatihan dan Pendampingan

BPKAD telah didukung oleh pelatihan dalam peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP. Dimana BPKAD setiap tahun telah mengadakan bimtek untuk operator SIMDA dari pengembang langsung yaitu BPKP. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada KAA selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD. Beliau mengatakan:

“ iya, setiap tahun selalu diadakan bimtek untuk operator simda disemua SKPD. Artinya operator di semua SKPD dikumpulkan untuk di bimtekkan. Walaupun sudah praktek tapi selalu ada *sharing* informasi. Kendala-kendala apa, kita *sharing* informasi. Dan semua dari pengembang langsung BPKP, bukan kita. Artinya kalau mereka memiliki informasi yang terbaru, tiap tahun diadakan bimtek pengelolaan keuangan yang pesertanya seluruh operator simda dari SKPD”. (L/KAA/09/06/2015)

Hal yang sama dikatakan oleh KAB selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas. Beliau mengatakan:

“Dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA itu kami memperoleh pendampingan dari BPKP”. (L/KAB/08/06/2015)

2. Pembahasan

a. Indikator Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Kesiapan SDM dilihat dari segi Internal

a. Integritas

Integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa dari segi integritas penilaian kesiapan BPKAD dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual telah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan pegawai BPKAD yang menyatakan bahwa kejujuran sangat diperlukan dalam pelaporan keuangan dan kami juga memiliki pemimpin yang tegas dan bijaksana dalam hal pengambilan kebijakan sehingga mampu mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat dilihat dari hasil LKPD pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapat opini WTP.

b. Kompetensi

Kompetensi berarti pemilikan pengetahuan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara, pegawai BPKAD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi masih kurang, sehingga menyebabkan pemahaman akan akuntansi akrual masih kurang. Meskipun demikian, dalam menghadapi kendala tersebut, BPKAD di bantu oleh aplikasi SIMDA yang memudahkan mereka dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dimana setiap tahunnya selalu dilakukan bimtek dalam pengoperasian aplikasi tersebut oleh BPKP. Dalam hal ini, meskipun memiliki kendala dalam menerapkan SAP berbasis akrual, dengan dibantu aplikasi SIMDA yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan pelaporan keuangan berbasis akrual, bisa dikatakan bahwa BPKAD cukup siap.

c. Loyalitas

Loyalitas dapat diartikan sebagai mengikuti dengan patuh dan setia terhadap seseorang atau sistem/peraturan. Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa tingkat loyalitas pegawai BPKAD sudah sangat baik, dimana para pegawai selalu mendukung komitmen dari pimpinan terlebih lagi dalam sistem pelaporan keuangan. Para pegawai juga selalu mengikuti arahan dari pimpinan dalam sistem pencatatannya.

2. Kesiapan SDM dilihat dari segi eksternal

a. Reward

Reward adalah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya di berikan dalam bentuk material atau ucapan. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada BPKAD, di lihat bahwa *reward* yang diberikan lebih sedikit daripada *punishment* yang diterima. Hal ini akan mempengaruhi kinerja pegawai terlebih lagi dalam sistem pelaporan keuangan yang membutuhkan dorongan dan semangat dalam penyelesaiannya. Namun dalam hal apresiasi di BPKAD, para pegawai selalu menerima apresiasi bagi mereka yang cepat memberikan informasi dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Motivasi

Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa para pegawai memiliki dorongan untuk selalu mengikuti pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang dibantu dengan aplikasi SIMDA dan juga setiap ada informasi terbaru tentang akuntansi berbasis akrual, mereka selalu mengupdate informasi tersebut. Dengan dibantu aplikasi SIMDA pula, tujuan Transparansi, Akuntabel, dan Sistematis dapat dicapai dengan baik.

c. Budaya Organisasi

Budaya Organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Dari hasil wawancara, pada bagian akuntansi di BPKAD dalam mendukung hasil kerja yang optimal di bidang keuangan dengan menggunakan SAP sudah di dukung dengan lingkungan kerja yang sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari penataan ruangan yang tertata rapi sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam bekerja, selalu ada komunikasi saling berbagi kendala yang di hadapi dan mencari solusi bersama. Selain itu juga BPKAD di dukung oleh figur pimpinan yang menjadi panutan bagi mereka.

b. Indikator Kesiapan Sistem Informasi dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen sebagai sistem informasi yang merupakan bagian dari pengendalian Internal suatu instansi pemerintahan dimana meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi dan prosedur yang biasa digunakan untuk pemecahan masalah suatu instansi. Dari hasil wawancara, sistem manajemen informasi yang ada di BPKAD sudah sangat baik, karena BPKAD mempunyai program pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek dengan transparansi, akuntabilitas dalam bidang keuangan.

2. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak didefinisikan sebagai sistem yang bisa digunakan dalam meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien. Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa untuk menilai kesiapan BPKAD, sudah didukung dengan aplikasi SIMDA yang saat ini sudah akrual dan otomatis sehingga memberikan kontribusi positif terhadap kinerjanya, selain itu juga dengan adanya aplikasi ini, kendala yang dihadapi dari segi kompetensi SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual dapat diatasi.

3. Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan dan Pendampingan sistem adalah sebuah proses, cara melatih seseorang dalam mengoperasikan sistem sehingga bisa

diberlakukan dengan sebaiknya. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa BPKAD telah didukung oleh pelatihan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP. Dimana BPKAD setiap tahun telah mengadakan bimtek untuk operator SIMDA dari pengembang langsung yaitu BPKP.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara cukup siap dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan faktor lain dalam menilai kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis Akrua seperti Kesiapan Sarana dan Prasarana yang ada. Khusus untuk BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerapkan SAP Berbasis Akrua, perlu kiranya memberikan training-training tambahan untuk menambah pemahaman pegawai dalam melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis akrua.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwan, Mohammad Man. 2015. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua: Sebuah Analisis Deskriptif*. Skripsi diterbitkan. Makassar: Program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Baldrick, Siregar dan Bonni Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Bastian, I. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bodnar, George H, dan William S. Hopwood. 2002. *Sistem Informasi*. Akuntansi, Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A. dan Syam, M. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur. dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Indeks.
- Jogiyanto, HM. 2005. *Analisis dan Desain Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Khan, A. dan Mayes, S. 2009. *Transition to Accrual Accounting*, (<https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2009/tnm0902.pdf>) diakses tanggal 02 Maret 2015
- Kieso, Donald E. Dkk. 2002. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Kesepuluh, Jilid 1. Terjemahan oleh Emil Salim. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrua Pemda. Jakarta, 25 Maret.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mukhtar, A.M. 2002. *Audit Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Edisi ke-1. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mulyana, Budi. 2009. Penggunaan Akuntansi Akrua di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD. (<http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi-berbasis-akrua.pdf>). Diakses tanggal 8 April 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
- Kusuma, Ririz Setiawati. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*. Skripsi diterbitkan. Jember: Program Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Saleh, Z. dan Pendlebury M.W. 2002. *Accruals Accounting in Government-Developments in Malaysia*. *Asia Pacific Business Review*, 12 (4): 421-435.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Tickell, Geoffrey. 2010. *Cash to Accrual Accounting: One Nations Delemma*. *International Business & Economics Research Journal*, 9 (11): 71-77.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Widjajoso, Bambang. 2008. Penerapan Basis Akrua pada Akuntansi Pemerintahan Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan. (<http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi-berbasis-akrua.pdf>). Diakses tanggal 8 April 2015.